

LAPORAN AKHIR MAGANG

**ANALISIS PENGENDALIAN MANAJEMEN TERHADAP IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA BAGIAN
KEUANGAN SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN (DPKP) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Vanessa Okta Shafira

Student Number: 22312203

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

LAPORAN MAGANG
ANALISIS PENGENDALIAN MANAJEMEN TERHADAP IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA BAGIAN
KEUANGAN SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN
PANGAN (DPKP) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dibuat oleh:

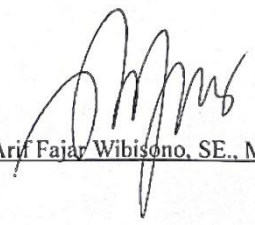
Vanessa Okta Shafira

Student Number: 22312203

Disahkan oleh,

Yogyakarta, 13 Maret 2026

Dosen Pembimbing



Arif Fajar Wibisono, SE., M.Sc., CFA

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Akhir Magang ini merupakan hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, laporan ini belum pernah dipresentasikan atau diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun. Selain itu, saya juga menyatakan bahwa apabila dalam penyusunan laporan ini terdapat ide, kata, atau ungkapan yang berasal dari orang lain, maka seluruhnya telah dicantumkan sumbernya dengan jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah dituliskan dalam daftar pustaka sebagaimana mestinya.

Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi apapun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan serta akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Maret 2026



Vanessa Okta Shafira

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan magang dan penulisan Laporan Akhir Magang ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menyelesaikan kegiatan magang dan penulisan laporan akhir ini.
2. Mama, Papa, serta kedua adik saya yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan semangat kepada saya selama proses perkuliahan hingga penyusunan laporan ini.
3. Bapak Arif Fajar Wibisono, SE., M.Sc., CFrA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan laporan ini.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya pada Bagian Keuangan Sekretariat, yang telah memberikan kesempatan, pengalaman, serta ilmu yang sangat berharga selama pelaksanaan magang.
5. Pakdhe saya, yaitu Lastomo, yang dengan tulus telah membantu membiayai SPP saya selama masa perkuliahan sehingga saya dapat menempuh pendidikan hingga tahap penyusunan laporan ini.
6. Sahabat terdekat saya selama perkuliahan, yaitu Nurul Hanifa Lutfiana, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan menjadi tempat berbagi cerita serta keluh kesah dalam berbagai proses perkuliahan hingga penyusunan laporan ini.
7. Teman saya sejak ospek hingga sekarang, yaitu Narindra Khisana dan Syahriani Cintia, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta kebersamaan selama perkuliahan.
8. Seseorang yang saya temui sejak duduk di bangku SMP, yaitu Muhammad Khoirul Abidin Abdul Azis, yang hingga saat ini senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa, serta dengan penuh kesabaran mendampingi saya dalam suka maupun duka. Dorongan yang diberikan tanpa henti sejak masa sekolah hingga sekarang membuat saya mampu bertahan dan menyelesaikan laporan ini.

9. Seluruh dosen dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu, bantuan, serta dukungan selama masa perkuliahan dan penyusunan laporan ini.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, Vanessa Okta Shafira, anak perempuan pertama yang membawa harapan besar dari kedua orang tua, yang telah bertahan dalam lelah, bangkit dari keraguan, dan tetap melangkah meskipun sering merasa tidak cukup. Terima kasih karena tidak menyerah, karena terus berjuang dan percaya bahwa setiap usaha dan doa tidak akan sia-sia, hingga akhirnya laporan ini dapat terselesaikan.

Yogyakarta, 13 Maret 2026

Vanessa Okta Shafira

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Laporan Magang.....	3
1.4 Sistematika Laporan	3
1.5 Manfaat Karya Ilmiah	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1 Pengendalian Manajemen	6
2.2 Sistem Pengendalian Manajemen	6
2.3 Keselarasan Tujuan dalam Sistem Pengendalian Manajemen.....	7
2.4 Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Manajemen	9
2.5 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	10
2.6 Penelitian Terdahulu	11
BAB III METODE PENELITIAN	14
3.1 Jenis Penelitian	14
3.2 Sumber dan Data Penelitian.....	14
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	15
3.4 Instrumen Penelitian	16
3.5 Teknik Analisis Data	16
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
4.1 Profil Tempat Magang	18

4.2 Aktivitas Magang.....	20
4.3 Hasil Penelitian	24
4.3.1 Penerapan Pengendalian Manajemen dalam Implementasi SIPD.....	24
4.3.2 Faktor Penyebab Lemahnya Pengendalian Manajemen dalam Penggunaan SIPD	28
4.3.3 Dampak Ketidakefektifan Sistem Pengendalian Manajemen	32
4.3.4 Upaya dan Rekomendasi Perbaikan Pengendalian Manajemen dalam Implementasi SIPD	34
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	38
5.1 Simpulan dan Saran	38
5.2 Implikasi	39
DAFTAR PUSTAKA.....	40
LAMPIRAN	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4. 1 Aktivitas Magang.....	20
Tabel 4. 2 Rekapitulasi penutupan akses SIPD	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.3. 1 Alur Perencanaan, Pengendaliann, dan Evaluasi SIPD	25
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Karakteristik Narasumber Wawancara.....	42
Lampiran 2: Daftar Hasil Wawancara	42
Lampiran 3: Curriculum Vitae.....	56

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengendalian manajemen terhadap implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerapan SIPD sebagai sistem informasi terintegrasi diharapkan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, namun masih menghadapi kendala operasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan landasan teori sistem pengendalian manajemen menurut Anthony dan Govindarajan serta konsep SIPD berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi selama kegiatan magang, dan dokumentasi berupa SOP serta dokumen keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengendalian manajemen melalui pembagian tugas, prosedur kerja, otorisasi berjenjang, dan pengawasan pimpinan memungkinkan implementasi SIPD berjalan secara terarah dalam proses pencatatan, pelaporan, dan monitoring realisasi anggaran. Namun demikian, kelemahan pengendalian muncul ketika sistem mengalami gangguan teknis, kesalahan input, serta keterbatasan koordinasi dengan pengelola sistem. Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan dalam pencatatan dan monitoring aktivitas keuangan sehingga efektivitas pengendalian manajemen tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkala, penyusunan prosedur alternatif ketika sistem mengalami gangguan, serta peningkatan koordinasi antarinstansi agar penggunaan SIPD dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Kata kunci: Pengendalian Manajemen, Implementasi SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bagian dari upaya transformasi digital tersebut, pemerintah menghadirkan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai Sistem terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pembangunan dan keuangan daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 12, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang berfungsi untuk mengelola berbagai data terkait pembangunan, keuangan, dan pemerintahan daerah lainnya secara terintegrasi (Permendagri Nomor 70, 2019). Seluruh informasi tersebut dirancang untuk saling terhubung dan dimanfaatkan sebagai sumber data utama yang akurat dan terpercaya guna mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah, proses pengambilan keputusan, serta pengelolaan dan publikasi informasi secara efisien bagi Pemerintahan Daerah.

Meskipun dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi dan keuangan daerah, implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DPKP DIY) masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa pegawai menyampaikan bahwa sistem sering mengalami gangguan teknis, sehingga proses input dan pengolahan data keuangan menjadi terhambat. Selain itu, belum tersedianya operator SIPD khusus yang menyebabkan penanganan masalah sistem berjalan lambat, yang akhirnya berdampak pada keterlambatan aktivitas keuangan. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam pengendalian manajemen di lingkungan organisasi, dimana pengendalian manajemen berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas instansi dapat terlaksana sesuai rencana dan mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan (Anthony & Govindarajan, 2007).

Gangguan sistem yang terjadi serta keterbatasan dalam penanganan permasalahan teknis SIPD menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan

keuangan daerah masih menghadapi beberapa kendala operasional. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kelancaran proses pencatatan, verifikasi, serta pemantauan aktivitas keuangan yang dilakukan melalui sistem. Dalam konteks sistem pengendalian manajemen, kelancaran aliran informasi dan koordinasi antar pihak merupakan faktor penting untuk memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (Anthony & Govindarajan, 2007). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme pengendalian manajemen berperan dalam mendukung implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada DPKP DIY, lemahnya pengendalian manajemen terlihat dari belum optimalnya pengaturan tanggung jawab pengelolaan SIPD, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem, serta belum adanya mekanisme pengawasan dan tindak lanjut yang memadai ketika terjadi gangguan sistem. Kondisi ini dapat berdampak pada terhambatnya pengelolaan anggaran, tidak tercapainya target kinerja, serta meningkatnya risiko kesalahan dalam proses keuangan. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu banyak berfokus pada dampak implementasi SIPD terhadap kinerja, namun masih terbatas pada eksplorasi dan analisis mendalam mengenai sejauh mana mekanisme pengendalian manajemen, khususnya yang berbasis tindakan dan personel, berfungsi atau gagal dalam memastikan keberhasilan dan efektivitas operasional sistem terintegrasi SIPD di lingkungan pemerintahan daerah. Penggunaan SIPD yang tidak didukung oleh pengendalian manajemen yang memadai dapat menyebabkan sistem yang seharusnya meningkatkan efisiensi justru menimbulkan hambatan dalam proses kinerja.

Dengan melihat kondisi tersebut, timbul ketertarikan pembahasan lebih lanjut untuk memahami bagaimana pengendalian manajemen berjalan dalam mendukung implementasi SIPD di Bagian Keuangan Sekretariat DPKP DIY, dengan judul **“Analisis Pengendalian Manajemen terhadap Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DIY”**

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengendalian manajemen dalam mendukung implementasi SIPD pada Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DPKP DIY)?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya pengendalian manajemen, dalam penggunaan SIPD pada Bagian Keuangan Sekretariat DPKP DIY?
3. Apa saja dampak ketidakefektifan pengendalian manajemen dalam penggunaan SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat DPKP DIY?
4. Bagaimana rekomendasi perbaikan pengendalian manajemen yang dapat dilakukan agar pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD menjadi lebih efektif dan efisien?

1.3 Tujuan Laporan Magang

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan pelaksanaan magang ini adalah:

1. Menganalisis penerapan sistem pengendalian manajemen dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Sekretariat Bagian Keuangan DPKP DIY.
2. Mengidentifikasi kendala serta faktor penyebab lemahnya pengendalian manajemen dalam penggunaan SIPD selama proses pelaksanaan tugas keuangan.
3. Menganalisis dampak ketidakefektifan pengendalian manajemen dalam penggunaan SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat DPKP DIY.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian manajemen guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan konsistensi implementasi SIPD dalam mendukung kinerja Sekretariat Bagian Keuangan DPKP DIY.

1.4 Sistematika Laporan

Laporan magang ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang pelaksanaan magang, perumusan masalah, tujuan laporan magang, sistematika laporan, serta manfaat karya ilmiah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis, meliputi konsep pengendalian manajemen, sistem pengendalian manajemen, Keselarasan Tujuan dalam Sistem Pengendalian Manajemen, evaluasi pengendalian manajemen, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan laporan magang.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum tempat magang, pelaksanaan aktivitas magang, hasil penelitian yang diperoleh selama magang, serta pembahasan mengenai penerapan pengendalian manajemen dalam implementasi SIPD.

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini memuat simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan untuk perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang, serta implikasi dari temuan penelitian baik secara praktis maupun akademis.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini memuat seluruh sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan magang, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi dokumen pendukung seperti karakteristik narasumber, daftar pertanyaan wawancara, dan CV

1.5 Manfaat Karya Ilmiah

1. Memahami lingkungan kerja di instansi pemerintah, termasuk etika, tanggung jawab, dan sikap profesional dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Memperoleh pengalaman dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan melalui keterlibatan langsung dalam proses kerja di Bagian Keuangan Sekretariat DPKP DIY.
3. Mengembangkan *soft skills* seperti komunikasi, manajemen waktu, kerja sama tim, dan pola pikir analitis dalam menyelesaikan pekerjaan.
4. Mengidentifikasi faktor penting dalam dunia kerja, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk belajar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengendalian Manajemen

Pengendalian manajemen merupakan proses yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian manajemen tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang mengarahkan perilaku individu agar selaras dengan kepentingan organisasi.

Pengendalian manajemen berperan penting dalam membantu organisasi mengimplementasikan strategi secara efektif melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan terarah (Anthony & Govindarajan, 2007). Keberadaan pengendalian manajemen memungkinkan manajemen untuk memantau pelaksanaan kegiatan, menilai kinerja, serta melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.

Dalam organisasi sektor publik, pengendalian manajemen memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian akuntabilitas dan transparansi, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengendalian manajemen berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Keberhasilan pengendalian manajemen sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem dalam mengarahkan perilaku pegawai agar sejalan dengan tujuan organisasi (Anthony & Govindarajan, 2007). Oleh karena itu, pengendalian manajemen perlu dirancang dengan mempertimbangkan aspek struktural, prosedural, dan perilaku dalam organisasi.

2.2 Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem pengendalian manajemen merupakan seperangkat mekanisme formal yang digunakan organisasi untuk membantu manajemen dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan strategi dan tujuan organisasi (Anthony & Govindarajan, 2007). Sistem ini berfungsi sebagai alat untuk mengkoordinasikan aktivitas organisasi serta mengarahkan perilaku pegawai.

Sistem pengendalian manajemen terdiri atas unsur-unsur yang saling berkaitan, seperti struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang, prosedur kerja, serta sistem pelaporan dan evaluasi kinerja (Anthony & Govindarajan, 2007). Unsur-unsur tersebut dirancang untuk menciptakan kejelasan peran dan tanggung jawab setiap pegawai sehingga aktivitas organisasi dapat berjalan secara terkoordinasi.

Dalam praktik organisasi, sistem pengendalian manajemen diwujudkan melalui berbagai bentuk pengendalian, antara lain perencanaan, pengawasan, dan evaluasi (Anthony & Govindarajan, 2007). Perencanaan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, pengawasan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan, sedangkan evaluasi digunakan untuk menilai kinerja dan mengidentifikasi penyimpangan.

Penerapan sistem pengendalian manajemen juga tercermin dalam penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pembagian tugas dan wewenang yang jelas, serta pelaksanaan pengawasan oleh atasan secara berjenjang. Selain itu, evaluasi kinerja dilakukan sebagai bentuk umpan balik bagi manajemen untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi.

Dalam organisasi sektor publik, sistem pengendalian manajemen tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip akuntabilitas publik. Oleh karena itu, sistem pengendalian manajemen perlu dirancang secara sistematis agar mampu mendukung pelaksanaan tugas organisasi serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

2.3 Keselarasan Tujuan dalam Sistem Pengendalian Manajemen

Keselaran tujuan (*goal congruence*) merupakan salah satu konsep penting dalam sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Konsep keselaran tujuan menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh individu seharusnya mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan (Anthony & Govindarajan, 2007). Dengan demikian, sistem pengendalian manajemen berperan dalam mengarahkan perilaku individu agar aktivitas yang dilakukan tetap sejalan dengan kepentingan organisasi.

Organisasi tidak dapat hanya mengandalkan kesadaran individu untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap individu dalam organisasi memiliki kepentingan, preferensi, serta persepsi yang berbeda terhadap pekerjaannya (Anthony & Govindarajan, 2007). Kondisi tersebut dapat menyebabkan tindakan yang dilakukan oleh individu tidak selalu selaras dengan tujuan organisasi apabila tidak terdapat mekanisme pengendalian yang jelas. Oleh karena itu, organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen yang mampu mengarahkan perilaku individu agar tindakan yang dilakukan tetap sejalan dengan kepentingan organisasi.

Sistem pengendalian manajemen dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme organisasi seperti pembagian tugas yang jelas, prosedur kerja, mekanisme otorisasi, serta sistem pelaporan dan evaluasi kinerja. Mekanisme tersebut digunakan oleh manajemen untuk memantau pelaksanaan aktivitas organisasi dan memastikan bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Anthony & Govindarajan, 2007). Selain itu, sistem pengendalian juga memungkinkan manajemen melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi serta mengambil tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Apabila sistem pengendalian manajemen tidak berjalan secara efektif, maka keselarasan tujuan antara individu dan organisasi dapat terganggu. Aktivitas organisasi tidak lagi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan (Anthony & Govindarajan, 2007). Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan pekerjaan, berkurangnya efektivitas pengawasan, serta meningkatnya risiko kesalahan dalam proses operasional organisasi.

Dalam organisasi sektor publik, keberadaan sistem informasi juga memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya keselarasan tujuan tersebut. Sistem informasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) digunakan untuk membantu proses pencatatan, pelaporan, serta monitoring aktivitas keuangan organisasi secara terintegrasi. Melalui penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu, sistem informasi dapat membantu manajemen dalam melakukan pengawasan serta memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi (Anthony & Govindarajan, 2007).

2.4 Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Manajemen

Sistem pengendalian manajemen tidak hanya dipahami sebagai seperangkat prosedur atau mekanisme administratif, tetapi sebagai proses sistematis yang dirancang untuk memastikan organisasi mampu mencapai tujuan strategisnya. Pengendalian manajemen merupakan proses dimana manajemen tingkat atas mempengaruhi manajemen tingkat bawah agar melaksanakan strategi organisasi secara konsisten (Anthony & Govindarajan, 2007). Dengan demikian, keberadaan sistem pengendalian manajemen tidak cukup dinilai dari keberadaan aturan, struktur, atau prosedur formal, melainkan dari kemampuannya mengarahkan tindakan organisasi menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas sistem pengendalian manajemen berkaitan erat dengan kemampuan organisasi menciptakan keselarasan tujuan (*goal congruence*) antara individu dan organisasi. Dalam organisasi yang terdesentralisasi, pegawai tidak secara otomatis memahami bagaimana pekerjaannya berkontribusi terhadap tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengendalian manajemen berfungsi memberikan arah kerja yang jelas melalui perencanaan, pengukuran kinerja, dan komunikasi tujuan organisasi, sehingga setiap individu mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan untuk mendukung pencapaian strategi organisasi.

Selain masalah pemahaman tujuan, pengendalian manajemen juga diperlukan karena pegawai tidak selalu memiliki motivasi yang selaras dengan kepentingan organisasi. Individu dapat memiliki kepentingan pribadi, preferensi kerja, atau interpretasi berbeda terhadap kebijakan organisasi. Oleh sebab itu, sistem pengendalian manajemen harus mampu memotivasi pegawai agar perilaku kerjanya sesuai dengan tujuan organisasi melalui mekanisme pengawasan, evaluasi kinerja, serta pemberian umpan balik. Dengan kata lain, efektivitas pengendalian manajemen tercermin dari kemampuannya mempengaruhi perilaku pegawai agar bertindak sesuai strategi organisasi.

Pengendalian manajemen juga berkaitan dengan ketersediaan kemampuan dan sumber daya organisasi. Pegawai mungkin telah memahami tujuan organisasi dan memiliki motivasi kerja yang baik, namun tanpa dukungan sarana, informasi, atau kompetensi yang memadai, tujuan organisasi tetap tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, sistem pengendalian manajemen harus memastikan tersedianya informasi, fasilitas

kerja, serta koordinasi organisasi agar aktivitas operasional dapat berjalan secara berkelanjutan. Kegagalan menyediakan dukungan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian belum berfungsi secara efektif.

Berdasarkan konsep tersebut, efektivitas sistem pengendalian manajemen dapat dievaluasi dari kemampuannya mengarahkan perilaku, memotivasi pegawai, serta menjaga kelangsungan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan strategis. Dengan demikian, suatu sistem informasi atau prosedur kerja tidak otomatis menjadi pengendalian manajemen yang efektif, kecuali sistem tersebut mampu memastikan aktivitas organisasi tetap berjalan dan tujuan organisasi tercapai. Kerangka evaluasi ini menjadi dasar analisis dalam menilai peran sistem dalam mendukung atau melemahkan pengendalian manajemen organisasi.

Dalam konteks organisasi sektor publik, keberadaan sistem informasi juga memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas sistem pengendalian manajemen. Sistem informasi memungkinkan proses pencatatan, pemantauan, dan pelaporan kegiatan organisasi dilakukan secara lebih sistematis dan terintegrasi. Melalui penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu, sistem informasi dapat membantu manajemen dalam melakukan pengawasan, evaluasi kinerja, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, keberadaan sistem informasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat menjadi salah satu instrumen yang mendukung pelaksanaan pengendalian manajemen dalam organisasi sektor publik.

2.5 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung secara elektronik. Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD didefinisikan sebagai *“pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah”* (Permendagri Nomor 70, 2019). Penerapan SIPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

SIPD dibangun untuk mempermudah penyediaan dan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat, serta mengintegrasikan seluruh data perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satu sistem yang terhubung. Hal tersebut disebutkan dalam pertimbangan huruf a dan b Permendagri No. 70 Tahun 2019 bahwa SIPD diperlukan untuk kemudahan penyampaian informasi dan untuk memenuhi kewajiban penyediaan informasi pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan (Permendagri Nomor 70, 2019). Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (1) ditegaskan bahwa SIPD dibangun “*untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik*” (Permendagri Nomor 70, 2019).

Dengan demikian, SIPD dapat disimpulkan instrumen strategis dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam transparansi anggaran, optimalisasi penyusunan APBD, efisiensi pelayanan publik, integrasi data lintas perangkat daerah, dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data. Penerapan SIPD menjadi pondasi penting untuk mendukung akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Utama
1	(Balqis et al., 2021)	<i>Implementasi SIPD pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat</i>	Implementasi SIPD belum berjalan optimal akibat keterbatasan SDM kompeten, minimnya pelatihan, kendala komunikasi, serta struktur birokrasi yang belum mendukung. Selain itu, gangguan sistem masih sering terjadi dan menghambat proses input data serta perencanaan.

2	(Madany & Maryani, 2025)	<i>Implementasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung</i>	SIPD telah mendukung proses perencanaan dan penganggaran, namun masih menghadapi kendala teknis seperti error login, server yang lambat, keterbatasan petunjuk teknis, serta pengawasan internal yang belum optimal.
3	(Dhea Ayu Puspitasari, 2025)	<i>Analisis Penerapan SIPD pada BPKAD Kota Yogyakarta</i>	Penerapan SIPD mampu meningkatkan efisiensi, akurasi pelaporan, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, masih terdapat kendala jaringan, keterbatasan fitur sistem, serta perlunya peningkatan pelatihan pengguna.
4	(Maulani et al., 2024)	<i>Inovasi Teknologi dalam Pemerintahan: Implementasi SIPD sebagai Alat untuk Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	Implementasi SIPD di beberapa daerah dinilai cukup efektif, khususnya dalam perencanaan dan penganggaran. Namun, penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan SDM, sinkronisasi data, serta lemahnya kebijakan operasional. (Literature review berbasis kualitatif).
5	(Teken & Romarina, 2024)	<i>Efektivitas Penerapan SIPD terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar</i>	SIPD dinilai belum efektif karena sering mengalami gangguan sistem, kurangnya integrasi dengan SIPKD, lambatnya adaptasi pengguna, minimnya pelatihan, serta lemahnya koordinasi dan respons dari pemerintah pusat.

6	(Yulianty & Hayat, 2023)	<i>Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Upaya Mencegah Terjadinya Fraud</i>	Implementasi SIPD dapat memperkuat pengendalian internal dan membantu mencegah terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan daerah, namun masih menghadapi kendala teknis dan adaptasi pengguna terhadap sistem baru.
7	(Diah et al., 2025)	<i>Evaluasi Penerapan SIPD dalam Pelaporan Keuangan di BPKAD Kabupaten Buton</i>	Penerapan SIPD dalam pelaporan keuangan belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta gangguan sistem. Meskipun demikian, SIPD mampu meningkatkan integrasi data dan efisiensi proses pelaporan keuangan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan menggambarkan fenomena secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek yang bersifat alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2013). Melalui pendekatan ini, fenomena dipahami secara mendalam dengan mengumpulkan data deskriptif, berupa kata-kata, tindakan, atau dokumen yang relevan.

Penelitian kualitatif digunakan ketika peneliti ingin memahami makna, persepsi, nilai, atau interaksi sosial yang terjadi dalam suatu konteks tertentu (Sugiyono, 2013). Proses penelitian dilakukan secara natural, tidak memanipulasi variabel, dan lebih menekankan pada interpretasi mendalam terhadap temuan di lapangan. Dengan demikian, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang dikaji melalui proses pengumpulan data secara wajar, observasi langsung, dan interaksi dengan informan.

3.2 Sumber dan Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lingkungan Bagian Keuangan Sekretariat DPKP DIY melalui interaksi dengan informan yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan dan penggunaan SIPD. Data ini mencakup informasi mengenai pelaksanaan pengendalian manajemen, kendala operasional SIPD, serta pengalaman pegawai dalam menjalankan tugasnya. Informasi primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi selama peneliti menjalankan aktivitas magang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen internal dan literatur yang relevan. Dokumen tersebut meliputi SOP keuangan, alur kerja penyusunan SPJ, alur input SIPD, struktur organisasi, dan contoh SPJ. Selain itu, data sekunder juga mencakup literatur akademik berupa buku-buku yang membahas *Management Control System*

(MCS), terutama karya Anthony & Govindarajan, beserta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas implementasi SIPD dan pengendalian manajemen.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung dengan pihak terkait untuk menggali informasi yang bersifat mendalam. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan dan penggunaan SIPD di Bagian Keuangan Sekretariat DPKP DIY. Wawancara dilakukan secara langsung untuk memperoleh penjelasan terkait proses pengelolaan keuangan dan penggunaan SIPD di lingkungan Bagian Keuangan Sekretariat. Melalui wawancara ini, peneliti mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pengendalian manajemen serta berbagai kendala yang muncul dalam operasional sistem.

b. Observasi

Observasi digunakan untuk mengamati perilaku, aktivitas, dan kondisi yang terjadi pada objek penelitian secara langsung (Sugiyono, 2013). Observasi dilakukan selama peneliti melaksanakan kegiatan magang, khususnya pada proses penyusunan SPJ, input data SIPD, alur verifikasi, serta penerapan SOP di Bagian Keuangan Sekretariat. Melalui observasi, peneliti dapat melihat kesesuaian antara prosedur tertulis dan praktik yang berlangsung di lapangan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan sebagai metode untuk memperoleh data melalui berbagai jenis dokumen yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari SOP keuangan, alur kerja penyusunan SPJ, alur input SIPD, struktur organisasi, contoh dokumen SPJ, serta dokumen pendukung lainnya. Selain itu, dokumentasi juga mencakup literatur berupa buku, regulasi, dan jurnal yang berkaitan dengan pengendalian manajemen dan implementasi SIPD.

3.4 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data memerlukan pedoman wawancara agar penggalian informasi dilakukan secara sistematis. Pedoman wawancara digunakan untuk memastikan data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian, khususnya dalam mengevaluasi penerapan pengendalian manajemen pada penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Penyusunan pedoman wawancara mengacu pada konsep sistem pengendalian manajemen menurut Anthony dan Govindarajan yang memandang pengendalian manajemen sebagai proses dimana manajemen tingkat atas mempengaruhi manajemen tingkat bawah agar melaksanakan strategi organisasi. Berdasarkan konsep tersebut, evaluasi pengendalian manajemen dilakukan dengan menilai kemampuan sistem dalam memberikan arah kerja, menciptakan keselarasan tujuan antara individu dan organisasi, melakukan pengawasan terhadap aktivitas, serta memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai prosedur dan tujuan organisasi.

Berdasarkan kerangka tersebut, pedoman wawancara disusun dalam beberapa aspek evaluasi, yaitu: (1) pemahaman pegawai terhadap tujuan dan prosedur kerja dalam penggunaan SIPD, (2) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan, (3) mekanisme otorisasi dan pembagian tugas antar pengguna sistem, (4) monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan melalui sistem, serta (5) kendala operasional dan efektivitas penggunaan SIPD dalam mendukung pekerjaan.

Melalui pedoman wawancara tersebut, data yang diperoleh tidak hanya menggambarkan penggunaan sistem, tetapi juga menunjukkan bagaimana SIPD berperan dalam pengendalian manajemen, baik dalam mengarahkan pekerjaan, mengawasi aktivitas, maupun memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan organisasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu proses pengolahan dan interpretasi data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi menjadi uraian yang sistematis dan mudah dipahami. Pendekatan ini digunakan karena data yang diperoleh berupa informasi verbal, pernyataan informan, serta catatan lapangan, bukan angka atau hitungan statistik.

Dalam penelitian kualitatif, data disajikan dalam bentuk narasi untuk menggambarkan kondisi sebenarnya yang terjadi pada objek penelitian, sehingga analisis dilakukan dengan cara menguraikan temuan secara deskriptif berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan (Sugiyono, 2013).

Data yang telah terkumpul kemudian disusun, dipilih, dan ditafsirkan untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang relevan dengan fokus penelitian. Proses analisis dilakukan tanpa menggunakan perhitungan matematis, karena penelitian kualitatif lebih menekankan pada kedalaman makna dari informasi yang diperoleh, bukan pada pengukuran numerik (Sugiyono, 2013).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Tempat Magang

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DPKP DIY) merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Keberadaan dinas ini berada dalam koordinasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. DPKP DIY mulai beroperasi secara resmi sejak 1 Januari 2019 sebagai bagian dari kebijakan penataan organisasi perangkat daerah yang bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan.

Pembentukan DPKP DIY merupakan hasil penggabungan beberapa perangkat daerah yang sebelumnya berdiri sendiri, yaitu Dinas Pertanian DIY, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, serta urusan perkebunan yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Penggabungan ini dilakukan untuk menciptakan koordinasi yang lebih terpadu dalam pengelolaan sektor pertanian dan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara yuridis, pembentukan dan penyelenggaraan tugas DPKP DIY berlandaskan pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 serta peraturan pelaksana lainnya, termasuk Peraturan Gubernur DIY Nomor 91 Tahun 2024. Aktivitas operasional dinas ini dipusatkan di kantor yang berlokasi di wilayah Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DPKP DIY berfokus pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Ruang lingkup tugas tersebut mencakup pengelolaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kesehatan hewan, serta penguatan sistem ketahanan pangan daerah. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi teknis tersebut, DPKP DIY juga menjalankan fungsi administratif dan pendukung agar seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana secara terencana dan berkelanjutan.

Struktur organisasi DPKP DIY disusun untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Struktur tersebut terdiri atas pimpinan dinas, unsur sekretariat, bidang-bidang teknis, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Sekretariat Dinas

memiliki peran penting sebagai pusat koordinasi administrasi yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan program, serta pengelolaan keuangan dan aset. Melalui peran tersebut, Sekretariat menjadi penghubung antara kebijakan pimpinan dan pelaksanaan teknis di lapangan.

Kegiatan magang yang menjadi dasar penyusunan laporan ini dilaksanakan pada lingkungan Sekretariat DPKP DIY, khususnya pada unit yang menangani pengelolaan keuangan dinas. Unit ini bertanggung jawab dalam proses perencanaan anggaran, pengendalian realisasi anggaran, pencatatan transaksi keuangan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Aktivitas pengelolaan keuangan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dijalankan oleh seluruh bidang di lingkungan DPKP DIY.

Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPKP DIY berkontribusi dalam menciptakan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat di sektor pertanian dan pangan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah, optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian, serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat tani. Kontribusi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan teknis, tetapi juga melalui pengelolaan anggaran yang terencana dan bertanggung jawab.

Dalam konteks tersebut, praktik manajemen dan akuntansi memiliki peranan penting sebagai alat pendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPKP DIY mencerminkan penerapan prinsip perencanaan, pengendalian, serta pelaporan keuangan yang sistematis. Praktik ini berfungsi sebagai sarana pengendalian internal dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah, sekaligus mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

4.2 Aktivitas Magang

Tabel 4. 1 Aktivitas Magang

Tanggal	Aktivitas Kegiatan	Output	Pendamping Magang
1–3 Oktober 2025	• Perkenalan dan penjelasan tugas magang • Menerima daftar tugas magang di Sekretariat Bagian Keuangan DPKP DIY • Mempelajari profil DPKP DIY melalui <i>website</i>	Memahami struktur organisasi, tugas, fungsi, dan ruang lingkup kerja DPKP DIY	Erna Ermawati, A.Md – Pengolah Data dan Informasi
6–10 Oktober 2025	• Menyusun SPJ Fungsional • Membuat daftar arsip berdasarkan dokumen di ruang arsip (Januari–Mei 2019)	Tersusunnya, SPJ Fungsional dan daftar arsip dokumen keuangan periode Januari–Mei 2019	Erna Ermawati, A.Md – Pengolah Data dan Informasi
13–17 Oktober 2025	• Membuat daftar arsip dokumen di ruang arsip (Juni–Oktober 2019)	Tersusunnya daftar arsip dokumen keuangan periode Juni–Oktober 2019	Erna Ermawati, A.Md – Pengolah Data dan Informasi
	• Membuat daftar arsip dokumen di ruang arsip	Tersusunnya daftar arsip dokumen keuangan periode	Erna Ermawati, A.Md – Pengolah Data dan Informasi

20–21 Oktober 2025	(November– Desember 2019)	November– Desember 2019	
27–30 Oktober 2025	• Memeriksa kebenaran dan kecocokan SPJ Keuangan dengan lampiran • Melengkapi nomor SPJ Keuangan dan lembar pajak dengan nomor pembukuan bendahara	SPJ Keuangan telah diperiksa dan dilengkapi nomor pembukuan sesuai ketentuan	Erna Ermawati, A.Md – Pengolah Data dan Informasi
4–7 November 2025	• Mengarsip buku pembantu pajak tahun 2019	Buku pembantu pajak tersusun rapi dalam arsip	Erna Ermawati, A.Md – Pengolah Data dan Informasi
11–13 November 2025	• Memeriksa kebenaran dan kecocokan SPJ Keuangan dengan lampiran • Melengkapi nomor SPJ Keuangan dan lembar pajak dengan nomor pembukuan bendahara	SPJ Keuangan periode terkait telah diverifikasi dan dilengkapi nomor pembukuan	Erna Ermawati, A.Md – Pengolah Data dan Informasi

17–20 November 2025	• Mengarsip LS bulan Maret–Desember 2019	Arsip LS periode Maret–Desember 2019 tersusun lengkap	Erna Ermawati, A.Md – Pengolah Data dan Informasi
25–26 November 2025	• Memeriksa kebenaran dan kecocokan SPJ Keuangan dengan lampiran • Melengkapi nomor SPJ Keuangan dan lembar pajak dengan nomor pembukuan bendahara	SPJ Keuangan telah diperiksa dan dilengkapi nomor pembukuan	Erna Ermawati, A.Md – Pengolah Data dan Informasi
2– 3 Desember 2025	• Menyusun dokumen keuangan berdasarkan kode rekening belanja dan sub kegiatan	Tersusunnya dokumen keuangan yang tertib dan sesuai kode rekening belanja serta sub kegiatan	Erna Ermawati, A.Md – Pengolah Data dan Informasi
9–18 Desember 2025	• Input BPA2 pajak pegawai PNS DPKP DIY untuk masa pajak terakhir pada sistem Coretax	Terinputnya data BPA2 pajak PNS DPKP DIY secara lengkap dan akurat pada sistem Coretax	Mifthach Aspiana Utami, A.Md.Ak. – Pengelola Akuntansi

2– 4 Januari 2026	• Input jurnal Penyusutan Triwulan IV pada SIPD	Jurnal penyusutan Triwulan IV berhasil diinput dan terdokumentasi pada SIPD	Mifthach Aspiana Utami, A.Md.Ak. – Pengelola Akuntansi
12–14 Januari 2026	• Melakukan pengecekan dan perbaikan data serta melengkapi rekap jurnal penyusutan Triwulan I, II, dan III melalui SIPD.	Data dan rekap jurnal penyusutan Triwulan I–III tervalidasi dan diperbarui pada SIPD	Mifthach Aspiana Utami, A.Md.Ak. – Pengelola Akuntansi
19–23 Januari 2026	• Revisi data Belanja Hibah 2025 pada SIPD • Revisi jurnal Penyusutan Triwulan II pada SIPD	• Data Belanja Hibah Tahun 2025 berhasil direvisi pada SIPD • Jurnal penyusutan Triwulan II berhasil direvisi pada SIPD	Mifthach Aspiana Utami, A.Md.Ak. – Pengelola Akuntansi
26–30 Januari 2026	• Input Jurnal penyesuaian mutasi asal usul belanja persediaan tahun 2025 pada SIPD • Input BPA2 pajak pegawai PPPTK DPKP DIY untuk masa pajak terakhir pada sistem Coretax	• Jurnal penyesuaian mutasi persediaan tahun 2025 berhasil diinput pada SIPD • Data BPA2 pajak PPPTK DPKP DIY berhasil diinput pada sistem Coretax berhasil direvisi pada SIPD	Mifthach Aspiana Utami, A.Md.Ak. – Pengelola Akuntansi

4.3 Hasil Penelitian

4.3.1 Penerapan Pengendalian Manajemen dalam Implementasi SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan aplikasi utama yang digunakan dalam pengelolaan keuangan pada Bagian Keuangan Sekretariat DPKP DIY. Sistem ini digunakan untuk pencatatan transaksi keuangan, pembukuan, pembuatan SPP dan SPM, serta penyusunan laporan keuangan. Selain itu, SIPD juga dimanfaatkan untuk memantau realisasi anggaran dan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil observasi, penatausahaan keuangan dilakukan melalui akun SIPD sesuai kewenangan masing-masing pegawai. Proses diawali dari penginputan dokumen kegiatan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ke dalam sistem. Dokumen yang telah diinput tidak dapat langsung diproses, tetapi terlebih dahulu diperiksa oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD).

Setelah dilakukan pemeriksaan, dokumen diteruskan kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk memperoleh persetujuan. Apabila disetujui, sistem memproses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian menjadi dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dana yang telah dicairkan selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh bendahara melalui penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara. Setiap tahapan dilakukan oleh pejabat yang berbeda sehingga proses pengelolaan keuangan berjalan secara berurutan melalui sistem.

Selain itu, pimpinan dapat memantau perkembangan realisasi anggaran melalui sistem berdasarkan data transaksi yang telah diinput. Sistem juga tidak memungkinkan pengguna melanjutkan ke tahap berikutnya sebelum tahapan sebelumnya diselesaikan oleh pejabat berwenang.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa SIPD mempermudah pelaksanaan transaksi pengeluaran kas, penerimaan kas, pengelolaan gaji, serta pencatatan akuntansi. Staf Pengolah Data dan Informasi menyampaikan bahwa

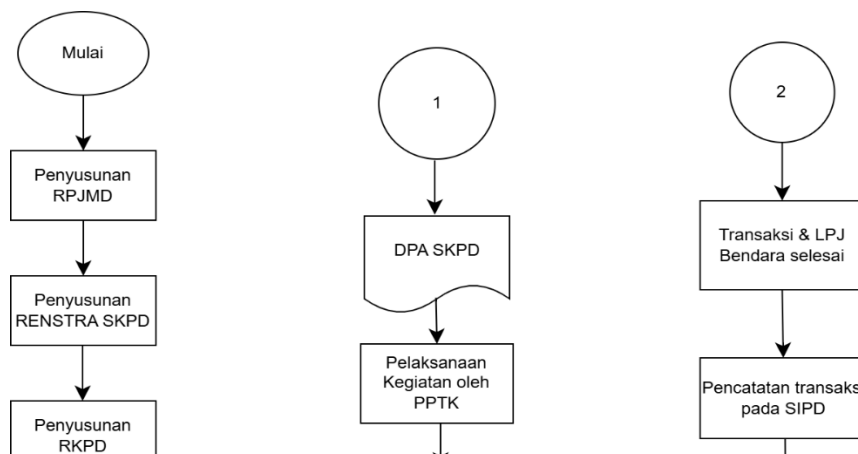
“SIPD mempermudah pelaksanaan transaksi pengeluaran kas, penerimaan kas, pengelolaan gaji dan pengelolaan akuntansi serta mempermudah monitoring pelaksanaan anggaran dan kemajuan realisasi anggaran”. (EE)

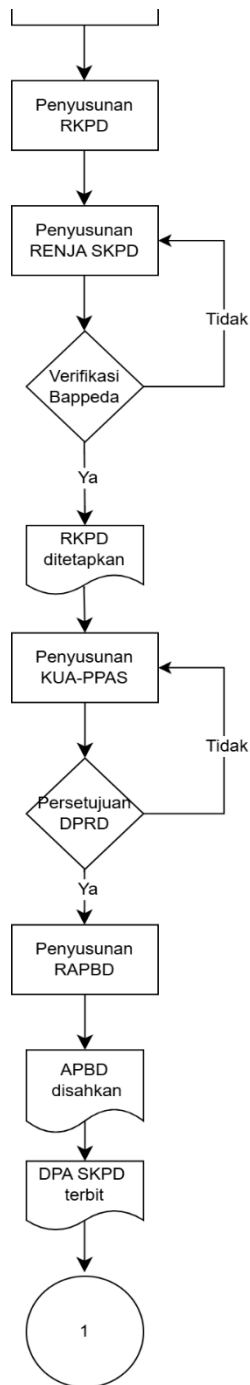
Hal ini menunjukkan bahwa SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai sarana pengendalian aktivitas keuangan melalui pencatatan dan monitoring secara sistematis.

Berdasarkan dokumentasi berupa Modul Penatausahaan SIPD Kementerian Dalam Negeri, alur pengelolaan keuangan daerah dimulai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan anggaran kas, pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD), pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), verifikasi dan persetujuan pejabat berwenang, penerbitan SP2D hingga penyusunan LPJ bendahara. Setiap tahapan melibatkan pihak yang berbeda seperti PPTK, PPK-SKPD, PA/KPA dan Bendahara sehingga terdapat mekanisme pengawasan pada setiap transaksi.

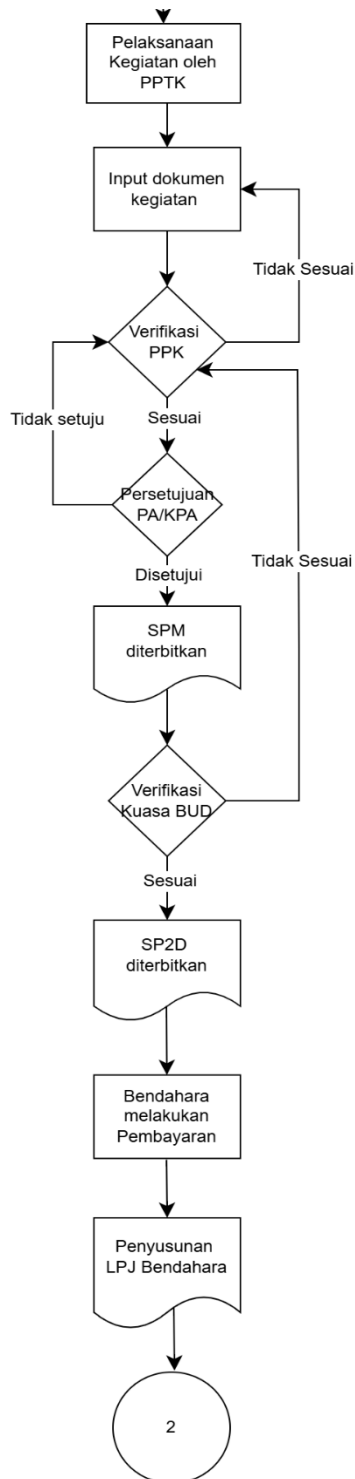
Uraian hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan SIPD tidak hanya berupa prosedur administrasi penatausahaan, tetapi membentuk suatu mekanisme pengendalian aktivitas keuangan. Berikut hubungan antar proses tersebut, alur implementasi SIPD dipetakan dalam diagram alir,

Gambar 4.3. 1 Alur Perencanaan, Pengendaliann, dan Evaluasi SIPD

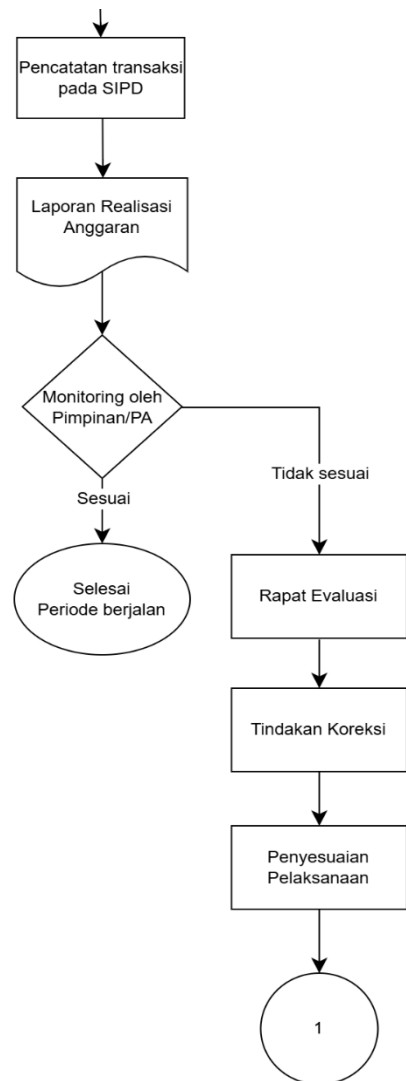




Perencanaan



Pengendalian



Evaluasi

1. Pengendalian Tahap Perencanaan

Diagram alir tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebelum melalui proses perencanaan dan penganggaran hingga diterbitkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Rencana kegiatan harus diverifikasi terlebih dahulu dan hanya dapat dilanjutkan apabila sesuai dengan prioritas pembangunan serta memperoleh alokasi anggaran. Mekanisme ini menunjukkan adanya pengendalian preventif (*preventive control*), karena organisasi memastikan kegiatan telah direncanakan sebelum dilaksanakan.

2. Pengendalian Tahap Pelaksanaan

Diagram tersebut memperlihatkan adanya otorisasi berjenjang dalam proses pengeluaran kas. Dokumen kegiatan diverifikasi oleh PPK-SKPD, disetujui oleh PA/KPA, dan diperiksa kembali oleh Kuasa BUD sebelum SP2D diterbitkan. Setiap pejabat memiliki kewenangan untuk menolak dan mengembalikan dokumen apabila tidak sesuai. Kondisi ini menunjukkan adanya pemisahan fungsi dan pembatasan akses terhadap kas daerah, sehingga membentuk pengendalian pelaksanaan (*concurrent control*).

3. Pengendalian Tahap Evaluasi

Setelah transaksi dicatat dan LPJ bendahara disusun, data transaksi dalam SIPD menghasilkan laporan realisasi anggaran yang digunakan pimpinan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan. Apabila realisasi tidak sesuai dengan rencana, dilakukan evaluasi dan tindakan korektif. Hal ini menunjukkan adanya pengendalian umpan balik (*feedback control*) karena organisasi membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan SIPD mengikuti SOP penatausahaan keuangan dan tidak memiliki SOP khusus tersendiri. Sistem hanya mendigitalisasi prosedur yang telah ada, sementara pimpinan melakukan pengawasan melalui akun sistem dan rapat evaluasi realisasi anggaran. Berdasarkan teori

pengendalian manajemen, organisasi menggunakan mekanisme formal berupa prosedur kerja, pembagian tugas, serta pengawasan untuk memastikan aktivitas berjalan sesuai tujuan (Anthony & Govindarajan, 2007). Dengan demikian, penggunaan SIPD telah memenuhi unsur tersebut karena terdapat pembagian tugas, otorisasi, serta monitoring kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian manajemen yang diterapkan dalam organisasi memungkinkan penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara tertib dan terarah sesuai dengan tujuan organisasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dhea Ayu Puspitasari, 2025) serta (Yulianty & Hayat, 2023) yang menunjukkan bahwa penggunaan SIPD berkontribusi pada efisiensi pelaporan keuangan dan peningkatan akuntabilitas. Dalam penelitian ini, efisiensi tersebut terjadi karena penerapan pengendalian manajemen melalui pembagian tugas, otorisasi berjenjang, serta pengawasan pimpinan memungkinkan pemanfaatan SIPD berjalan secara tertib dan terarah. Selain itu, SIPD sebagai sistem informasi keuangan terintegrasi menyediakan sarana pencatatan dan pelaporan yang mendukung pelaksanaan pengawasan. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Balqis et al., 2021) dan (Teken & Romarina, 2024) yang menemukan implementasi SIPD belum optimal akibat keterbatasan SDM dan kendala sistem. Pada DPKP DIY, SIPD justru telah berjalan operasional dan mendukung pengendalian manajemen, sehingga dapat disimpulkan bahwa SIPD bukan menggantikan pengendalian manajemen, melainkan memperkuat efektivitas pengendalian yang telah diterapkan sebelumnya.

4.3.2 Faktor Penyebab Lemahnya Pengendalian Manajemen dalam Penggunaan SIPD

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kelemahan pengendalian manajemen dalam penggunaan SIPD pada Bagian Keuangan Sekretariat DPKP DIY terutama disebabkan oleh ketergantungan tinggi terhadap sistem. Sebagian besar narasumber menyatakan bahwa seluruh proses penatausahaan keuangan dilakukan melalui SIPD sehingga ketika sistem mengalami gangguan, kegiatan pengelolaan keuangan tidak dapat berjalan secara normal. Pengolah Data dan Informasi menyampaikan bahwa

“gangguan yang disebabkan sistem down atau pemutakhiran data sistem dan anggaran biasanya terjadi 1 sampai dengan 4 hari kerja, sehingga menyebabkan terhambatnya proses input data keuangan dan pelaksanaan transaksi pembayaran.” (EE)

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Pengelola Akuntansi yang menyatakan bahwa

“gangguan sistem mungkin terjadi selama 2–3 hari, dan tentu saja pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat bahkan tidak bisa dilaksanakan karena seluruh tahap pembukuan membutuhkan SIPD.” (MAU)

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan sangat bergantung pada sistem, sehingga ketika SIPD tidak dapat diakses, aktivitas administrasi dan pembukuan tidak dapat berjalan secara optimal.

Tabel 4. 2 Rekapitulasi penutupan akses SIPD

No	Periode	Kendala Operasional SIPD	Durasi (hari)	Dampak/Keterangan	Tindakan/Catatan
1	Oktober 2025	-	0	Sistem berjalan normal, tidak ada penutupan	-
2	3-5 November 2025	Pergantian akun Pengguna Anggaran / pengangkatan Kepala Dinas baru	3	Sistem tidak dapat diakses untuk input transaksi baru	Penyesuaian akun, menunggu <i>update</i> admin
3	10-12 November 2025	Penataan anggaran kas	3	Beberapa transaksi ditunda, laporan belum lengkap	Penataan & input manual sementara
4	5-9 Desember 2025	Penataan anggaran kas	5	Terhambatnya pembuatan laporan keuangan	Input manual & koordinasi internal

Temuan tersebut diperkuat oleh data pendukung yang menunjukkan beberapa kali penutupan akses SIPD. Pada periode 3–5 November 2025 sistem tidak dapat diakses selama tiga hari karena pergantian akun pengguna, kemudian pada 10–12 November 2025 serta 5–9 Desember 2025 terjadi penutupan sistem akibat penataan anggaran kas

yang berdampak pada penundaan transaksi dan terhambatnya penyusunan laporan keuangan. Selama periode tersebut, pegawai harus menunda input transaksi dan melakukan pencatatan manual sementara. Hal ini menunjukkan bahwa ketika sistem berhenti, pengendalian terhadap transaksi keuangan juga melemah karena tidak terdapat pemantauan secara *real time*.

Selain faktor ketergantungan sistem, kelemahan pengendalian juga disebabkan oleh gangguan teknis SIPD. Pengadministrasi Perkantoran menyatakan bahwa

“gangguan berlangsung beberapa hari, persiapan penyiapan data dan pembayaran gaji dan tunjangan agak terlambat.” (S)

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika sistem mengalami kendala, proses administrasi keuangan, khususnya dalam penyiapan data dan pembayaran, menjadi terhambat. Untuk mengatasi kondisi tersebut, bagian keuangan melakukan pencatatan manual menggunakan *spreadsheet* hingga sistem kembali normal. Namun, pencatatan ganda antara sistem dan manual berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data sehingga efektivitas pengendalian menjadi berkurang.

Berdasarkan dokumentasi Modul Penatausahaan SIPD Kementerian Dalam Negeri, proses pengelolaan keuangan daerah seharusnya berjalan secara terintegrasi mulai dari DPA, SPD, SPP, SPM, verifikasi, persetujuan, SP2D hingga LPJ bendahara. Alur tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi keuangan dikendalikan melalui tahapan verifikasi dan persetujuan berjenjang. Oleh karena itu, ketika SIPD tidak dapat digunakan, tahapan pengendalian tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal karena sistem merupakan media utama pelaksanaan verifikasi dan otorisasi.

Faktor lainnya adalah kesalahan pengguna (*human error*) dan keterbatasan kewenangan organisasi. Penelaah Teknis Kebijakan menyebutkan

“Adanya kesalahan input nominal dan kesalahan pemilihan rekening. Selain itu, apabila terjadi kesalahan sistem, OPD tidak dapat memperbaikinya secara langsung dan harus berkoordinasi dengan BPKA, Kasda, atau Pusdatin Kemendagri”. (YAK)

Berdasarkan teori pengendalian manajemen, pengendalian efektif terjadi apabila manajemen mampu memantau kegiatan dan melakukan tindakan korektif secara tepat

waktu (Anthony & Govindarajan, 2007). Namun ketergantungan pada pihak eksternal menyebabkan proses koreksi membutuhkan waktu sehingga pengendalian tidak berjalan optimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Balqis et al., 2021), (Teken & Romarina, 2024), serta (Diah et al., 2025) yang menyatakan bahwa gangguan sistem, keterbatasan infrastruktur, serta kendala teknis menjadi hambatan dalam implementasi SIPD. Namun penelitian ini berbeda dalam hal penyebab utama kelemahan pengendalian. Pada penelitian sebelumnya, kelemahan implementasi umumnya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pelatihan, sedangkan pada DPKP DIY faktor utama justru berasal dari ketergantungan terhadap sistem terpusat dan gangguan teknis aplikasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lemahnya pengendalian manajemen dalam penggunaan SIPD bukan disebabkan oleh prosedur organisasi, melainkan oleh faktor teknologi sistem, koordinasi eksternal, serta ketiadaan sistem cadangan ketika terjadi gangguan.

Berdasarkan konsep evaluasi sistem pengendalian manajemen, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian tidak hanya disebabkan oleh gangguan teknis sistem, tetapi karena fungsi pengendalian tidak dapat berjalan secara berkelanjutan. Ketika SIPD tidak dapat diakses, proses verifikasi, monitoring, dan tindakan korektif tidak dapat dilakukan tepat waktu sehingga organisasi kehilangan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem belum mampu menjaga kontinuitas pengendalian dan keselarasan pelaksanaan kegiatan dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, kelemahan pengendalian manajemen dalam penggunaan SIPD berkaitan dengan belum optimalnya kemampuan sistem dalam mendukung pengarahannya perilaku, pengawasan aktivitas, serta pelaksanaan tindakan korektif secara tepat waktu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kendala penggunaan SIPD tidak hanya berdampak pada aspek teknis sistem, tetapi juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengendalian manajemen dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketika sistem tidak dapat diakses, proses verifikasi transaksi, pencatatan keuangan, serta pemantauan realisasi anggaran tidak dapat dilakukan secara langsung melalui sistem. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengendalian yang seharusnya berjalan secara

real time menjadi tertunda dan sebagian aktivitas pencatatan harus dilakukan secara manual.

Dalam perspektif sistem pengendalian manajemen, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem informasi memiliki peran penting dalam mendukung mekanisme pengendalian organisasi. Sistem informasi seperti SIPD berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa proses penatausahaan keuangan berjalan sesuai prosedur melalui mekanisme otorisasi, pencatatan, serta monitoring kegiatan keuangan. Oleh karena itu, kendala operasional sistem dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian manajemen, khususnya dalam hal ketepatan waktu pencatatan dan pemantauan aktivitas keuangan.

4.3.3 Dampak Ketidakefektifan Sistem Pengendalian Manajemen

Ketidakefektifan sistem pengendalian manajemen dalam organisasi dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap pelaksanaan kegiatan operasional, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Dalam konsep sistem pengendalian manajemen, pengendalian tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga untuk menjamin bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Anthony dan Govindarajan, sistem pengendalian manajemen merupakan proses dimana manajemen mempengaruhi anggota organisasi agar melaksanakan strategi dan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien (Anthony & Govindarajan, 2007). Oleh karena itu, ketika mekanisme pengendalian tidak berjalan secara optimal, maka proses monitoring, evaluasi, serta tindakan korektif terhadap aktivitas organisasi juga akan mengalami hambatan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), keberadaan sistem informasi memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan pengendalian manajemen. Sistem informasi berfungsi sebagai sarana pencatatan transaksi, verifikasi dokumen, serta penyediaan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan. Apabila sistem tersebut mengalami gangguan atau tidak dapat digunakan, maka proses pengendalian yang seharusnya berjalan secara real time menjadi tertunda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas sistem informasi

sangat berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian manajemen dalam organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Bagian Keuangan Sekretariat DPKP DIY, diketahui bahwa gangguan pada sistem SIPD memberikan dampak langsung terhadap kelancaran proses pengelolaan keuangan. Beberapa narasumber menyampaikan bahwa ketika sistem mengalami gangguan, proses input data keuangan dan pelaksanaan transaksi pembayaran menjadi terhambat. Pengolah Data dan Informasi menyampaikan bahwa

“gangguan yang disebabkan sistem down atau pemutakhiran data sistem dan anggaran biasanya terjadi 1 sampai dengan 4 hari kerja, sehingga menyebabkan terhambatnya proses input data keuangan dan pelaksanaan transaksi pembayaran.” (EE)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pencatatan transaksi yang seharusnya dilakukan secara sistematis melalui SIPD menjadi tertunda hingga sistem kembali normal.

Selain menghambat proses pencatatan transaksi, gangguan sistem juga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan serta monitoring kegiatan keuangan. Beberapa narasumber menyampaikan bahwa ketika sistem mengalami error atau maintenance, pekerjaan yang berkaitan dengan pembukuan dan pelaporan keuangan tidak dapat dilaksanakan karena seluruh proses penatausahaan keuangan bergantung pada SIPD. Bahkan dalam beberapa kondisi, keterlambatan akses sistem dapat mempengaruhi proses penyiapan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap sistem menyebabkan aktivitas pengelolaan keuangan menjadi tidak dapat berjalan secara optimal ketika sistem mengalami gangguan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, bagian keuangan biasanya melakukan pencatatan manual sementara menggunakan spreadsheet atau dokumen manual hingga sistem dapat digunakan kembali. Meskipun cara ini dapat membantu menjaga kelangsungan pekerjaan, pencatatan ganda antara sistem dan dokumen manual berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data apabila tidak dilakukan penginputan

ulang secara cermat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika sistem informasi tidak dapat digunakan, mekanisme pengendalian yang seharusnya dilakukan melalui sistem menjadi melemah karena proses verifikasi dan monitoring tidak dapat dilakukan secara langsung.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketidakefektifan sistem pengendalian manajemen dalam penggunaan SIPD memiliki beberapa dampak terhadap pengelolaan keuangan daerah, antara lain keterlambatan pencatatan transaksi keuangan, tertundanya proses monitoring realisasi anggaran, serta meningkatnya potensi ketidaksesuaian data akibat pencatatan manual sementara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai komponen penting yang mendukung efektivitas sistem pengendalian manajemen dalam organisasi sektor publik.

4.3.4 Upaya dan Rekomendasi Perbaikan Pengendalian Manajemen dalam Implementasi SIPD

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar narasumber menyatakan bahwa penggunaan SIPD pada Bagian Keuangan Sekretariat DPKP DIY pada dasarnya telah berjalan efektif dan efisien. SIPD dinilai mempermudah pelaksanaan penatausahaan keuangan, mempercepat proses kerja, serta menyediakan data keuangan yang tersimpan secara berkelanjutan dan akurat. Pengadministrasi Perkantoran menyampaikan bahwa

“Penggunaan SIPD membuat pelaksanaan penatausahaan keuangan lebih cepat dan menjadi media penyajian data berkelanjutan yang akurat”. (S)

Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah mendukung pengelolaan keuangan, namun masih diperlukan beberapa perbaikan agar pengendalian manajemen dapat berjalan lebih optimal.

Meskipun penggunaan SIPD telah membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, beberapa kendala operasional yang terjadi menunjukkan adanya dampak terhadap pelaksanaan pengendalian manajemen. Ketika sistem mengalami gangguan atau tidak dapat diakses, proses pencatatan transaksi, verifikasi dokumen, serta pemantauan realisasi anggaran tidak dapat dilakukan secara langsung melalui sistem. Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dalam proses

monitoring kegiatan keuangan serta menunda pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran.

Dalam perspektif sistem pengendalian manajemen, ketersediaan informasi yang akurat dan tepat waktu merupakan elemen penting untuk mendukung fungsi pengawasan dan evaluasi kinerja organisasi. Apabila informasi keuangan tidak dapat diakses secara real time, maka kemampuan manajemen dalam melakukan monitoring dan tindakan korektif juga menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas sistem informasi memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengendalian manajemen, karena sistem informasi seperti SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sarana penyedia informasi bagi manajemen dalam mengendalikan aktivitas organisasi (Anthony & Govindarajan, 2007).

Rekomendasi pertama berkaitan dengan peningkatan stabilitas sistem. Pengolah data dan informasi menyatakan bahwa

“Gangguan sistem, maintenance, dan server yang lambat menjadi hambatan utama pekerjaan”. (MFA)

Oleh karena itu diperlukan peningkatan stabilitas *server*, pengurangan frekuensi *down time*. Bendahara Pengeluaran mengusulkan bahwa

“Pembaruan aplikasi dilakukan setelah jam kerja atau hari libur dan meningkatkan kecepatan server”. (ACR)

Perbaikan ini penting karena berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, kelemahan pengendalian manajemen terutama muncul ketika sistem tidak dapat diakses, sehingga pengawasan transaksi dan pencatatan keuangan tidak dapat dilakukan secara *real time*.

Rekomendasi kedua adalah penguatan prosedur pengendalian internal organisasi. Pengolah Data dan Informasi menyarankan bahwa

“Perlunya evaluasi penggunaan SIPD yang melibatkan pelaksana bidang/UPTD bersama staf keuangan”. (EE)

Evaluasi berkala ini diperlukan agar kesalahan input, keterlambatan pencatatan, serta hambatan operasional dapat diidentifikasi lebih awal. Selain itu, organisasi perlu

menetapkan prosedur darurat (*contingency procedure*) ketika sistem mengalami gangguan, sehingga pencatatan manual yang dilakukan sementara tetap memiliki standar yang jelas dan dapat mengurangi risiko ketidaksesuaian data.

Rekomendasi ketiga berkaitan dengan pengembangan fitur dan kualitas informasi sistem. Beberapa narasumber menyampaikan perlunya penambahan fitur serta perincian menu laporan agar informasi yang dihasilkan lebih lengkap dan akurat. Pengembangan fitur ini penting untuk mendukung fungsi pengendalian manajemen karena laporan yang lebih rinci akan mempermudah pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja keuangan.

Rekomendasi terakhir adalah peningkatan koordinasi antara organisasi perangkat daerah dengan pengelola sistem di tingkat pemerintah daerah dan pusat. Dalam praktiknya, apabila terjadi kesalahan atau gangguan sistem, OPD harus berkoordinasi dengan BPKA atau pengembang sistem. Oleh karena itu diperlukan mekanisme komunikasi dan pendampingan teknis yang lebih cepat agar proses perbaikan tidak menghambat pekerjaan. Hal ini sejalan dengan konsep SIPD sebagai sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Dengan demikian, perbaikan pengendalian manajemen tidak hanya dilakukan melalui perbaikan teknologi, tetapi juga melalui penguatan prosedur organisasi, evaluasi berkala, peningkatan kualitas informasi, serta koordinasi antarinstansi. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD.

Secara keseluruhan, penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bagian Keuangan Sekretariat DPKP DIY menunjukkan bahwa sistem informasi telah mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara lebih terstruktur dan terdokumentasi. Melalui penggunaan SIPD, proses pencatatan transaksi, verifikasi dokumen, serta pemantauan realisasi anggaran dapat dilakukan secara lebih sistematis sehingga mempermudah manajemen dalam melakukan monitoring kegiatan keuangan.

Meskipun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala operasional seperti gangguan sistem dan keterlambatan akses, secara umum penggunaan SIPD tetap

memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini membantu meningkatkan ketertiban administrasi keuangan, mempercepat proses kerja, serta mendukung pelaksanaan fungsi pengendalian manajemen melalui penyediaan informasi keuangan yang terintegrasi. Dengan demikian, implementasi SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana yang memperkuat efektivitas sistem pengendalian manajemen dalam organisasi.

Berdasarkan perspektif sistem pengendalian manajemen, rekomendasi tersebut tidak hanya bertujuan memperbaiki sistem teknologi, tetapi untuk memastikan fungsi pengendalian dapat berjalan secara efektif. Stabilitas sistem diperlukan agar proses verifikasi dan monitoring dapat dilakukan secara berkelanjutan, prosedur darurat diperlukan agar pengendalian tetap berlangsung ketika sistem terganggu, serta peningkatan koordinasi memungkinkan tindakan korektif dilakukan lebih cepat. Dengan demikian, perbaikan yang diusulkan berfungsi memperkuat kemampuan organisasi dalam mengarahkan aktivitas, mengawasi pelaksanaan kegiatan, serta menjaga pencapaian tujuan organisasi.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pengendalian manajemen pada Bagian Keuangan Sekretariat DPKP DIY telah dilaksanakan melalui pembagian tugas, verifikasi berjenjang, otorisasi pejabat berwenang, serta pengawasan pimpinan. SIPD digunakan sebagai sarana pencatatan dan monitoring aktivitas keuangan sehingga membantu manajemen dalam mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur.
2. Lemahnya pengendalian manajemen dalam penggunaan SIPD disebabkan oleh ketergantungan pada sistem yang tinggi sehingga ketika sistem mengalami gangguan, proses pencatatan, verifikasi, dan monitoring tidak dapat dilakukan secara tepat waktu. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi pengawasan tidak berjalan secara berkelanjutan sehingga pengendalian manajemen belum berjalan optimal.
3. Ketidakefektifan sistem pengendalian manajemen dalam penggunaan SIPD menimbulkan beberapa dampak terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Ketika sistem mengalami gangguan atau tidak dapat diakses, proses pencatatan transaksi, verifikasi dokumen, serta monitoring realisasi anggaran tidak dapat dilakukan secara tepat waktu. Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan dalam proses pencatatan dan pengawasan aktivitas keuangan serta meningkatkan potensi ketidaksesuaian data karena sebagian pencatatan harus dilakukan secara manual sementara.
4. Upaya perbaikan pengendalian manajemen dalam penggunaan SIPD dapat dilakukan melalui peningkatan stabilitas dan keandalan sistem, penyusunan prosedur alternatif ketika sistem mengalami gangguan, serta peningkatan koordinasi dan dukungan teknis agar proses pengawasan dan pencatatan tetap berjalan secara konsisten.

Penelitian ini terbatas pada satu organisasi perangkat daerah dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak instansi atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun metode campuran agar efektivitas pengendalian manajemen dapat diukur secara lebih komprehensif.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis dan akademis terkait penerapan pengendalian manajemen dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada organisasi sektor publik.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada efektivitas mekanisme pengendalian manajemen dalam organisasi. Pembagian tugas yang jelas, otorisasi berjenjang, serta pengawasan pimpinan berperan penting dalam memastikan proses penatausahaan keuangan berjalan tertib melalui sistem. Oleh karena itu, instansi pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengendalian manajemen agar penggunaan SIPD dapat mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap sistem informasi dapat menimbulkan risiko terhadap efektivitas pengendalian manajemen ketika terjadi gangguan teknis. Ketika SIPD tidak dapat diakses, proses pencatatan transaksi, verifikasi dokumen, serta monitoring realisasi anggaran tidak dapat dilakukan secara real time sehingga pengawasan aktivitas keuangan menjadi tertunda. Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi perlu memiliki mekanisme pengendalian tambahan, seperti prosedur alternatif atau pencatatan sementara yang terstandarisasi.

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian sistem pengendalian manajemen di sektor publik, khususnya dalam konteks penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD tidak menggantikan fungsi pengendalian manajemen, tetapi berperan sebagai sarana yang mendukung pelaksanaan pengendalian melalui pencatatan, monitoring, dan pelaporan keuangan secara terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2007). Management control systems. twelfth. In *McGraw-Hill* (12th ed., Vol. 11). McGraw-Hill/Irwin.
- Balqis, N., Fadhly, Z., & Maulyanda. (2021). Implementasi aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) application in the transmigration and manpower. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 1(1), 146–161.
- Dhea Ayu Puspitasari, H. M. (2025). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah (SIPD) pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) kota yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Nasional*, 3(1), 167–186.
- Diah, Abidin, Z., Ode, L., & Islamy, S. (2025). Evaluasi Penerapan SIPD Dalam Pelaporan Keuangan Di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buton. *Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 12(2), 503–510.
- Madany, A. L., & Maryani, N. (2025). Analisis implementasi sistem informasi pemerintah daerah di lingkungan pemerintah kota bandung. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 5(2), 569–581.
<https://doi.org/10.55047/transekonomika.v5i2.887>
- Maulani, A., Anshori, M. I., & Andriani, N. (2024). Inovasi teknologi dalam pemerintahan: implementasi SIPD sebagai alat untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1415–1422. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3451>
- Permendagri Nomor 70. (2019). Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah. *Permendagri Republik Nomor 70, Nomor 65(879)*, 2004–2006.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D* (Revised Pr). CV Alfabeta.
- Teken, I. K. A., & Romarina, A. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 111–123.
<https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4419>

Yulianty, D., & Hayat, U. S. (2023). SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA FRAUD. *Jurnal Bisnis, Ekonomi, Dan Sains (BES)*, 3(2), 558–566.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Karakteristik Narasumber Wawancara

Inisial Narasumber	Jabatan
EE	Pengolah Data dan Informasi
MFA	Pengolah data dan informasi
YAK	Penelaah Teknis Kebijakan
ACR	Bendahara Pengeluaran
MAU	Pengelola Akuntansi
S	Pengadministrasi Perkantoran

Lampiran 2: Daftar Hasil Wawancara

1. Sejak kapan SIPD mulai diterapkan di Sekretariat Bagian Keuangan DPKP DIY?

Inisial – Jabatan	Jawaban
EE – Pengolah Data dan Informasi	2022
MFA – Pengolah Data dan Informasi	2021
YAK – Penelaah Teknis Kebijakan	2022
ACR – Bendahara Pengeluaran	2022
MAU – Pengelola Akuntansi	2022
S – Pengadministrasi Perkantoran	2022

2. Modul SIPD apa saja yang digunakan dalam proses pengelolaan keuangan di DPKP DIY?

Inisial – Jabatan	Jawaban
EE – Pengolah Data dan Informasi	Modul Pengeluaran Kas, Penerimaan Kas, Pengelolaan Gaji dan Pengelolaan Akuntansi

MFA – Pengolah Data dan Informasi	Modul Penatausahaan
YAK – Penelaah Teknis Kebijakan	Gaji, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Akuntansi
ACR – Bendahara Pengeluaran	Perencanaan Anggaran Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
MAU – Pengelola Akuntansi	Penerimaan, Pengeluaran, Akuntansi
S – Pengadministrasi Perkantoran	SIPD: Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengelolaan Gaji, Pengelolaan Akuntansi

3. Bagaimana peran SIPD dalam mendukung kegiatan pengelolaan keuangan sehari-hari di Sekretariat Bagian Keuangan?

Inisial – Jabatan	Jawaban
EE – Pengolah Data dan Informasi	Mempermudah pelaksanaan transaksi pengeluaran kas, penerimaan kas, pengelolaan gaji dan pengelolaan akuntansi. Mempermudah monitoring pelaksanaan anggaran dan kemajuan realisasi anggaran berdasarkan anggaran kas. Sebagai media untuk menyimpan data keuangan secara berkelanjutan.
MFA – Pengolah Data dan Informasi	untuk melakukan pembukuan terhadap setiap SPJ belanja yang ada di dinas, melakukan penginputan pajak, pembuatan spp dan spm untuk belanja LS, serta mencetak hasil laporan berupa bku, lpj fungsional, dll
YAK – Penelaah Teknis Kebijakan	Sangat penting dan mempermudah dalam pengelolaan keuangan
ACR – Bendahara Pengeluaran	Mempermudah pelaksanaan pencatatan dan pengelolaan keuangan

MAU – Pengelola Akuntansi	SIPD menjadi aplikasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan serta perencanaan di Pemda. Sebetulnya penggunaan SIPD itu tidak hanya di Yogyakarta, melainkan digunakan semua Pemerintah Daerah, walaupun mungkin penggunaan secara efektifnya berbeda antar daerah. Dalam lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, setiap personalia dalam Bagian Keuangan memiliki peran dalam mengoperasikan SIPD.
S – Pengadministrasi Perkantoran	Mempermudah dalam pelaksanaan dan monitoring penatausahaan keuangan serta keamanan data

4. Apakah terdapat SOP tertulis terkait penggunaan SIPD? kalau ada, apakah SOP tersebut khusus SIPD atau tergabung dengan SOP keuangan?

Inisial – Jabatan	Jawaban
EE – Pengolah Data dan Informasi	SOP Keuangan terdiri dari SOP Verifikasi SPJ Keuangan, SSOP Pengajuan Nota Pencairan Dana, SOP Pengajuan Uang Muka Kerja, SOP Pengajuan SPP dan SPM Uang Persediaan (UP), SOP Pengajuan SPP dan SPM Tambah Uang Persediaan (TUP), SOP Pengajuan SPP dan SPM Langsung Barang dan Jasa dan atau Gaji (LS), SOP Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Pengeluaran, SOP Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan dan SOP Penyusunan Laporan Keuangan
MFA – Pengolah Data dan Informasi	ada
YAK – Penelaah Teknis Kebijakan	Tidak ada
ACR – Bendahara Pengeluaran	tergabung dengan SOP Keuangan
MAU – Pengelola Akuntansi	SOP keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sudah disesuaikan dengan mekanisme penatausahaan yang dirancang dalam sistem SIPD sehingga keduanya terintegrasi. Dalam SIPD pun, alur

	penatausahaan keuangan juga berasal dari SOP penatausahaan APBD secara umum.
S – Pengadministrasi Perkantoran	SOP Penggunaan SIPD selaras dengan SOP Keuangan yang mengatur kinerja Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengelolaan Gaji dan Pengelolaan Akuntansi

5. Bagaimana alur kerja penggunaan SIPD dan apakah dalam praktiknya sudah berjalan sesuai SOP?

Inisial – Jabatan	Jawaban
EE – Pengolah Data dan Informasi	Alur kerja penggunaan SIPD dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan
MFA – Pengolah Data dan Informasi	pertama pptk menginputkan npd (nota pencairan dana) belanja spj nya di akun sipd pptk, lalu bendahara dan pa mengapprove belanja itu, lalu bendahara membuku spj berdasarkan npd tadi, dan kemudian hasil pembukuan tadi akan otomatis masuk ke LPJ, kemudian lpj ini yang dikumpulkan ke inspektorat dan bpkad di akhir bulan nanti. untuk spp spm itu digunakan buat pencairan LS, dibuat di akun bendahara dan diapprove di akun ppk dan PA
YAK – Penelaah Teknis Kebijakan	Sudah
ACR – Bendahara Pengeluaran	sudah sesuai SOP
MAU – Pengelola Akuntansi	Sudah, walupun tentunya terkadang terdapat kendala dalam hal teknis. Tetapi kendala tersebut dapat diselesaikan dengan koordinasi antar stakeholder
S – Pengadministrasi Perkantoran	Penggunaan SIPD berjalan sesuai SOP karena langkah-langkah penggunaannya sudah diatur sesuai petunjuk manual dari kemendagri

6. Siapa saja yang terlibat dalam penggunaan SIPD di Sekretariat Bagian Keuangan, dan bagaimana pembagian tugasnya?

Inisial – Jabatan	Jawaban
EE – Pengolah Data dan Informasi	Pengguna SIPD di antaranya: Bendahara Pengeluaran Kas, Bendahara Penerimaan Kas, Sekretaris Dinas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PPK yang terdiri dari Penyiap SPM, Petugas Verifikasi SPJ, Pengelola Akuntansi, Penyiap Gaji, Kasir Pengeluaran, Pencatat Pembukuan dan Pembuat Dokumen Pengeluaran Kas.
MFA – Pengolah Data dan Informasi	semuanya terlibat, misal mba arum sebagai bendahara yang membukukan, mba erna selaku kasir memanfaatkan sipd untuk memantau hasil pembukuan bendahara dan mencocokkan dengan pembukuan manualnya, tami sebagai petugas akuntansi yang biasanya sibuk di awal januari untuk membuat lapkeu, bu yudhi selaku bendahara penerimaan, pak pri bendahara gaji, memakai sipd untuk menginput spp spm gaji, fathin untuk membuat spp spm ls
YAK – Penelaah Teknis Kebijakan	Penyiap gaji, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan. dikerjakan sesuai tugasnya
ACR – Bendahara Pengeluaran	Supriyanto membuat SPP-SPM Gaji dan TPP, Fathin membuat SPP-SPM Belanja barang, jasa, modal dan hibah serta Laporan Fungsional. Arum membuat SPP-SPM UP/GU/TU dan membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP) atas SPJ, Erna melakukan pengecekan atas TBP yg telah dibuat bendahara guna melakukan pembayaran atas TBP yang telah dibuat. Tami bagian akuntansi dan pelaporan
MAU – Pengelola Akuntansi	Di sekretariat terdapat Pengelola Akuntansi, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan. Ketiganya memiliki akun pribadi, namun akun bendahara2 tersebut juga sering digunakan secara paralel untuk menunjang ketugasan atau bagi tugas oleh pegawai lain.

S – Pengadministrasi Perkantoran	Seluruh pegawai keuangan menggunakan SIPD sesuai tugas dan fungsinya
----------------------------------	--

7. Menurut Bapak/Ibu apakah pemahaman pegawai terhadap SIPD sudah cukup?

Inisial – Jabatan	Jawaban
EE – Pengolah Data dan Informasi	Seluruh staf keuangan memiliki pemahaman yang memadai mengenai SIPD
MFA – Pengolah Data dan Informasi	sudah
YAK – Penelaah Teknis Kebijakan	Sudah
ACR – Bendahara Pengeluaran	Cukup
MAU – Pengelola Akuntansi	Sudah cukup baik di kalangan pihak yang mengelola keuangan, mengingat SIPD sudah digunakan cukup lama.
S – Pengadministrasi Perkantoran	Pegawai memiliki pemahaman yang memadai, terbukti dengan lancarnya pelaksanaan penatausahaan keuangan

8. Apakah pegawai pernah mendapatkan pelatihan atau bimbingan teknis terkait penggunaan SIPD? Apakah pelatihan tersebut dilakukan hanya pada awal penggunaan, rutin (misalnya setahun sekali), atau bersifat insidental?

Inisial – Jabatan	Jawaban
EE – Pengolah Data dan Informasi	Bimbingan Teknis penggunaan SIPD dilaksanakan pada awal tahun 2022 ketika SIPD mulai diterapkan di Pemda DIY, dan untuk selanjutnya jika ada pemutakhiran data pada sistem SIPD staf mempelajari secara mandiri dengan diberikannya modul perubahan Penggunaan SIPD yg dibagikan di WAG Bendahara. Paling terbaru, pengelola gaji diberikan bimbingan teknis SIPD pada akhir tahun 2025 mengenai

	pengelolaan gaji bulanan yang tersinkronisasi dengan Bank BPD
MFA – Pengolah Data dan Informasi	biasanya bendahara sih yang dibimtek kan untuk pelatihan sipd, biasa dilakukan di awal tahun
YAK – Penelaah Teknis Kebijakan	Ada, pada awal penggunaan
ACR – Bendahara Pengeluaran	setahun sekali pada awal tahun & hanya bendahara yang diundang untuk bimbingan teknis
MAU – Pengelola Akuntansi	Sesuai kebutuhan, pada awal penggunaan tentu saja terdapat pelatihan. Lalu terdapat pelatihan insidental apabila terdapat <i>update</i> fitur atau adanya kebijakan baru yang berpengaruh terhadap penatausahaan keuangan.
S – Pengadministrasi Perkantoran	Pada awal tahun 2022 dilaksanakan bimtek penggunaan SIPD, untuk tahun-tahun berikutnya jika ada pemutakhiran sistem pegawai mempelajari secara mandiri

9. Bisa diceritakan kapan terakhir dilakukan dan apakah ada pendampingan lain di luar pelatihan formal?

Inisial – Jabatan	Jawaban
EE – Pengolah Data dan Informasi	Tidak ada pelatihan non formal mengenai penggunaan SIPD
MFA – Pengolah Data dan Informasi	sepertinya nggak ada, terakhir tahun lalu, yang tahun ini belum ada
YAK – Penelaah Teknis Kebijakan	Di awal tahun 2022, ada pendampingan
ACR – Bendahara Pengeluaran	awal tahun 2025, pendampingan lain hanya dilakukan di WAG Bendahara. yang melakukan pendampingan dari Kasda selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
MAU – Pengelola Akuntansi	Apabila terdapat pertanyaan atau kendala pada SIPD biasanya OPD akan berkoordinasi dengan BPKA

	(Badan Pengelola Kekayaan dan Aset Daerah) sebagai mitra pengelolaan keuangan dan penghubung dengan kemendagri selaku pengembang.
S – Pengadministrasi Perkantoran	Bimtek SIPD pada akhir tahun 2025 mengenai pemutakhiran data gaji dengan sistem pembayarannya secara online

10. Bagaimana bentuk pengawasan pimpinan terhadap penggunaan SIPD dalam proses pengelolaan keuangan?

Inisial – Jabatan	Jawaban
EE – Pengolah Data dan Informasi	Pimpinan memiliki akun SIPD yang terdiri dari Sekretaris Dinas yang bertugas sebagai Verifikator Data/Dokumen Keuangan (SPJ Keuangan, Uang Muka Kerja, SPP UP/TUP/LS, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Laporan Akuntansi) dan Kepala Dinas yang bertugas sebagai Penyetuju Data/Dokumen Keuangan sehingga pengelolaan SIPD terpantau oleh pimpinan
MFA – Pengolah Data dan Informasi	biasanya sih pimpinan itu berkaitan dengan hasil akhir, misal realisasi nya berapa-berapa nya, lalu yang masih kurang kemudian digenjot belanja nya, biasanya dilakukan tiap rapat akhir bulan
YAK – Penelaah Teknis Kebijakan	Ada, dengan adanya akun PPK dan PA
ACR – Bendahara Pengeluaran	validasi oleh PPK dan PA
MAU – Pengelola Akuntansi	Pengawasan dilakukan tidak secara detail namun lebih umum dan menyeluruh. Sebagai contoh, penatausahaan keuangan dapat dinilai dengan melihat besarnya serapan anggaran. Dalam pengawasan menyeluruh tersebut, atasan juga kerap kali menjadi pihak yang menjadi konsultan dan mediator setiap kali terdapat permasalahan yang menghambat penatausahaan keuangan dan membutuhkan kebijakan di level yang lebih tinggi.

S – Pengadministrasi Perkantoran	Sekretaris Dinas sebagai verifikator data dan Kepala Dinas sebagai penyetuju data dan laporan
----------------------------------	---

11. Apakah terdapat evaluasi rutin terkait pelaksanaan penggunaan SIPD di Sekretariat Bagian Keuangan?

Inisial – Jabatan	Jawaban
EE – Pengolah Data dan Informasi	Evaluasi dilaksanakan tiap pertengahan bulan dengan mengundang pejabat pelaksana teknis (PPTK) dan pemegang uang muka kerja (PUMK) mengenai kemajuan realisasi keuangan
MFA – Pengolah Data dan Informasi	sepertinya nggak ada, karena masing-masing sudah memahami fungsinya
YAK – Penelaah Teknis Kebijakan	Iya
ACR – Bendahara Pengeluaran	sebulan sekali pada saat rapat PUMK
MAU – Pengelola Akuntansi	Evaluasi secara rutin dilakukan tidak spesifik pada penggunaan SIPD, namun lebih ke serapan penatausahaan keuangan. Biasanya terdapat rapat PUMK dan Rapat rutin untuk mengkaji proses dan hambatan penatausahaan keuangan pada setiap bidang di DPKP.
S – Pengadministrasi Perkantoran	Tidak ada evaluasi mengenai penggunaan SIPD

12. Bagaimana mekanisme tindak lanjut yang dilakukan apabila terjadi kendala atau kesalahan dalam penggunaan SIPD?

Inisial – Jabatan	Jawaban
EE – Pengolah Data dan Informasi	Jika kesalahan pada level di mana data belum terkunci, bisa dilakukan pembetulan data, namun jika data sudah terkunci (misal sudah termasuk dalam laporan pertanggungjawaban bendahara)

	akan dicarikan solusi sesuai prosedur pencatatan keuangan
MFA – Pengolah Data dan Informasi	biasanya menghubungi bagian kasda di bpka, kemudian dari kasda akan memberikan solusi setelah menghubungi tim sipd
YAK – Penelaah Teknis Kebijakan	Dikordinasikan dengan OPD terkait/BPKA
ACR – Bendahara Pengeluaran	melapor ke Kasda, kasda yang akan menindaklanjuti atau melaporkan ke Pusdatin
MAU – Pengelola Akuntansi	Dilakukan koordinasi internal apabila hanya melibatkan lingkup OPD. Namun apabila terkait sistem atau hal yang substantif, biasanya perlu dilakukan konsultasi ke BPKA.
S – Pengadministrasi Perkantoran	Jika kesalahan belum pada level data terkunci, data segera diperbaiki sesuai prosedur, namun jika kesalahan sudah pada level data terkunci, misal kekurangan pembayaran gaji, maka akan diperbaiki pada bulan berikutnya

13. Kendala apa saja yang paling sering dihadapi dalam penggunaan SIPD?

Inisial – Jabatan	Jawaban
EE – Pengolah Data dan Informasi	SIPD Penatausahaan Keuangan tidak bisa diakses jika sistem <i>down</i> , adanya pemutakhiran data sistem dan anggaran
MFA – Pengolah Data dan Informasi	sering <i>maintenance</i> , dan <i>down</i> , kadang juga laporan yang dihasilkan belum sesuai sehingga harus diedit secara manual
YAK – Penelaah Teknis Kebijakan	Salah <i>entry</i> nominal dan salah pilih rekening
ACR – Bendahara Pengeluaran	<i>Error, loading</i> lama

MAU – Pengelola Akuntansi	<i>Server yang down</i>
S – Pengadministrasi Perkantoran	SIPD tidak bisa diakses dikarenakan jaringan internet pemda sedang diadakan pemeliharaan dan ketika SIPD sedang pemutakhiran data (oleh kemendagri sistem ditutup sementara)

14. Ketika terjadi gangguan atau error pada SIPD, biasanya berlangsung dalam rentang waktu berapa lama hingga sistem dapat digunakan kembali? Dan bagaimana dampaknya terhadap kelancaran pekerjaan?

Inisial – Jabatan	Jawaban
EE – Pengolah Data dan Informasi	Gangguan yang disebabkan sistem <i>down</i> atau pemutakhiran data sistem dan anggaran biasanya terjadi 1 s.d. 4 hari kerja, menyebabkan terhambatnya proses input data keuangan dan pelaksanaan transaksi pembayaran
MFA – Pengolah Data dan Informasi	kadang hanya sehari, kadang bisa sampe 3 hari, kalo misal lagi nggak rame kerjaan ya aman aja, tapi kalo pas lagi sibuk2 nya itu biasanya akan menghambat banget, apalagi ketika di akhir bulan dan sudah dikejar realisasi oleh pimpinan
YAK – Penelaah Teknis Kebijakan	1 sampai 2 hari, input data jadi terlambat
ACR – Bendahara Pengeluaran	jika sedang <i>error</i> bisa sampai setengah hari kerja. Jika baru digunakan untuk pergeseran angkas, efisiensi pagu oleh teman2 di program bisa 2 sampai 3 hari. Pekerjaan tetap berjalan karena SPJ akan dicatatkan manual terlebih dahulu
MAU – Pengelola Akuntansi	mungkin 2-3 hari , tentu saja pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat bahkan tidak bisa dilaksanakan karena segala tahap pembukuan membutuhkan SIPD.

S – Pengadministrasi Perkantoran	Gangguan berlangsung beberapa hari, persiapan penyiapan data dan pembayaran gaji dan tunjangan agak terlambat
----------------------------------	---

15. Ketika SIPD mengalami gangguan, solusi sementara apa yang biasanya dilakukan oleh bagian keuangan agar pekerjaan tetap berjalan?

Inisial – Jabatan	Jawaban
EE – Pengolah Data dan Informasi	Melakukan persiapan dengan memeriksa kebenaran dokumen keuangan dan mencatat transaksi keuangan pada catatan manual (excel ataupun <i>spreadsheet</i>), sehingga ketika SIPD siap digunakan input data dapat dilakukan dan segera dilakukan transaksi pembayaran
MFA – Pengolah Data dan Informasi	paling ya membuku secara manual dulu, biar nanti tinggal diinput ke sipd ketika sudah aktif kembali
YAK – Penelaah Teknis Kebijakan	Tidak ada solusi, menunggu sampai SIPD normal kembali
ACR – Bendahara Pengeluaran	dibukukan secara manual terlebih dahulu (ada pencatatan manual di <i>google spreadsheet</i>)
MAU – Pengelola Akuntansi	Mengerjakan pekerjaan penunjang lainnya
S – Pengadministrasi Perkantoran	Di posisi saya sebagai Pengelola Gaji tidak ada yg bisa dikerjakan ketika SIPD mengalami gangguan

16. Menurut Bapak/Ibu, apakah penggunaan SIPD saat ini sudah berjalan secara efektif dan efisien?

Inisial – Jabatan	Jawaban
EE – Pengolah Data dan Informasi	Penggunaan SIPD sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien terbukti penatausahaan keuangan terlaksana lebih cepat dan SIPD juga menjadi media penyajian data berkelanjutan yang akurat

MFA – Pengolah Data dan Informasi	sudah efektif sih
YAK – Penelaah Teknis Kebijakan	Sudah cukup efektif dan efisien
ACR – Bendahara Pengeluaran	sudah berjalan secara efektif dan efisien
MAU – Pengelola Akuntansi	Sudah cukup efektif dan efisien
S – Pengadministrasi Perkantoran	Penggunaan SIPD berjalan secara efektif dan efisien dengan terlaksananya penatausahaan keuangan dengan lebih mudah dan akurat dan tersimpannya data gaji pada sistem

17. Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang perlu diperbaiki agar penggunaan SIPD dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang?

Inisial – Jabatan	Jawaban
EE – Pengolah Data dan Informasi	Perlunya evaluasi penggunaan SIPD yang diikuti oleh pelaksana Bidang/UPTD bersama staf keuangan demi perbaikan dan kemajuan penggunaan SIPD
MFA – Pengolah Data dan Informasi	semoga sipd tidak sering <i>down</i> lagi, dan <i>maintenance</i> karena itu benar2 menghambat pekerjaan
YAK – Penelaah Teknis Kebijakan	Untuk bendahara penerimaan, menu laporan lebih didetailkan lagi
ACR – Bendahara Pengeluaran	<i>update</i> menu di aplikasi dilakukan pada setelah jam kerja atau hari libur, penambahan kecepatan pada <i>server</i>
MAU – Pengelola Akuntansi	Perlu adanya peningkatan stabilitas sistem dan trafik pengguna agar perkerjaan tidak terhambat

S – Pengadministrasi Perkantoran	Penambahan fitur-fitur yang bisa menunjang pelaksanaan penatausahaan keuangan lebih cepat dan akurat
-------------------------------------	--

VANESSA OKTA SHAFIRA

 (+62) 81252934033  vanessashafira90@gmail.com

Profil

Saya merupakan mahasiswa Program Studi Akuntansi yang memiliki minat pada bidang pengelolaan keuangan, administrasi, dan pengolahan data. Pengalaman dalam organisasi dan kegiatan akademik membantu saya mengembangkan kemampuan analitis, ketelitian, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas secara efektif dan tepat waktu.

Pendidikan

Universitas Islam Indonesia (UII)

Mahasiswa Akuntansi (S1)

2022 – Sekarang

Kompetensi : ATLAS, ACL, SPSS, ERP-SAP, dan SAC (SAP Analytic Cloud)

Pengalaman Magang

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi DIY

Sekretariat Bagian Keuangan

Oktober 2025 –

Januari 2026

Pengalaman Organisasi

Fundraising Division, SAP (Super Accounting Program) 13

2024

- Mengelola proses pencarian dana untuk kebutuhan program.
- Menyusun strategi pendanaan dan kegiatan penggalangan dana.
- Berkoordinasi dengan divisi lain untuk memastikan kebutuhan dana program terpenuhi.

Serifikasi

- | | |
|---|------|
| • 30 Besar IAC 9 (Introduction to Accounting Competition) | 2022 |
| • SAP Course – Introduction to SAP S/4HANA using Global Bike Inc. | 2024 |
| • SAP Course – Business Process Integration & Configuration (S/4HANA) | 2025 |